



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 950/II/III/2017 • MARET 2017



AUDITOR DIHARAPKAN JADI EARLY WARNING SYSTEM

4 Ketua DPR RI Tegaskan
Dirinya Tidak Terlibat e-KTP

12 Pentingnya Edukasi Politik
Sejak Usia Dini

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Auditor Diharapkan Jadi *Early Warning System*

Auditor sebagai aparat pengawas intern memiliki peran dan posisi strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program organisasi.

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan, dan fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program, bertugas sebagai "pengawas" sekaligus sebagai pengawal dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan.

"Aparat Pengawas Intern dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai *early warning system*, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusinya sebelum pihak lain mengetahuinya," kata Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan dalam pertemuan Profesional Auditor Forum yang diselenggarakan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/03).

Dalam pertemuan yang melibatkan internal auditor dari berbagai instansi, dan tergabung dalam anggota *Institute of Internal Auditors (IIA)* itu mengusung tema "*To Serve Beyond Stakeholders Expectation in Public Sector*". Hadir dalam acara ini diantaranya Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned, Kepala Badan Keahlian Dewan Johnson Rajagukguk, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, dan Deputi Persidangan DPR RI Damayanti, serta Presiden IIA Hari Setianto.

Selain itu, jelas Taufik, auditor juga dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Sesuai konsep internal auditor terkini, peran aparat pengawasan

ditikberatkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian.

Taufik menambahkan, pre-audit dan post-audit dalam audit, memiliki peranan yang penting. Dalam pre-audit, akan dilakukan fungsi pengawasan sejak penetapan kebijakan perusahaan atau Pemerintah, mulai dari *planning, actuating, organizing*, hingga *controlling*.

"Sementara kalau post-audit itu dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan proses audit pada hasil kebijakan publik yang dilaksanakan menggunakan keuangan negara," imbuh Taufik.

Politisi F-PAN itu menjelaskan, auditor bukan hanya ada di pemerintahan saja, tapi juga perusahaan-perusahaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dikenal dengan nama Satuan Pengawas Internal (SPI). Sementara untuk di Pemerintah Daerah, dikenal dengan Inspektorat Wilayah Provinsi, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten maupun Kota untuk tingkat Kabupaten dan Kota. Menurutnya, dalam manajemen, auditor berperan sebagai polisi manajemen, yang berfungsi menjadi pengawas kebijakan.

"Di situlah fungsi ilmu daripada auditor itu, tentunya diharapkan bisa mencegah dan menurunkan bahaya laten korupsi. Kalau auditornya kuat dan manajemennya



Foto bersama Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan bersama pejabat Setjen DPR RI, BKD dan peserta Profesional Auditor Forum

berjalan baik, serta akuntabilitasnya tinggi, tentunya mengurangi penyimpangan yang tidak kita harapkan. Dalam manajemen, auditor berperan sebagai polisi manajemen," harap Taufik.

Di sisi lain, tambah Taufik, pihaknya juga mendorong agar semakin banyak auditor Indonesia yang mendapatkan sertifikasi internasional. Pasalnya, dari 1400 anggota IIA, hanya 280-an anggota yang sudah bersertifikasi internasional. Pihaknya pun membuka pintu seluas-luasnya kepada IIA untuk bekerjasama dengan Dewan terkait pembekalan ilmu audit, dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan.

"Sehingga, keilmuan fungsi audit ini dapat ditularkan kepada Anggota Dewan. Dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran, dapat memahami dasar keilmuan audit untuk dapat diimplementasikan dalam fungsi pengawasan. Sehingga bukan asal di bidang aspek politisnya saja, tapi sisi keilmuannya harus dipahami," tutup Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun



Keilmuan fungsi audit ini dapat ditularkan kepada Anggota Dewan. Dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran, dapat memahami dasar keilmuan audit untuk dapat diimplementasikan dalam fungsi pengawasan. Sehingga bukan asal di bidang aspek politisnya saja, tapi sisi keilmuannya harus dipahami.

berharap, melalui forum-forum semacam inilah dapat saling berbagi pengalaman, *knowledge sharing*, dan *net working* sesama profesi untuk dapat menggali dan merumuskan berbagai ide, gagasan, pemikiran untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan bahwa DPR RI sudah memiliki institusi pengawasan internal yang setingkat Eselon I, yang sebelumnya di Eselon III, yakni Inspektorat Utama.

"Hal ini menunjukkan komitmen bagaimana mengawal dan menjaga akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan negara di lingkup DPR RI," imbuh Setyanta.

Setyanta menambahkan, paradigma terhadap auditor kini harus diubah. Menurutnya, auditor harus berperan sebagai early warning system, sehingga auditor harus menjalankan pre-audit, bukan

post-audit.

"Auditor dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan atau potensi terjadinya penyimpangan. Agar jangan tidak menunggu sampai diperiksa, sehingga dapat memberikan peringatan sejak dini, agar hal itu tidak terjadi," jelas Setyanta.

Setyanta melaporkan, jika dinilai secara kelembagaan dan melalui metode internal *audit capability* model, saat ini Irtama DPR RI sudah berada pada level 2 dengan perbaikan. "Presiden mengamanatkan pada tahun 2019 mendatang, seluruh atau setidaknya 85 persen auditor harus berada di level 3," imbuh Setyanta.

Sementara itu, Presiden IIA Hari Setianto mengatakan, auditor internal memegang peranan penting, karena menjadi gawang lapis ketiga setelah unit pelaksana operasional dan unit manajemen resiko. Sehingga, kemampuan auditor harus senantiasa ditingkatkan.

"Kita ingin meningkatkan kompetensi supaya internal auditor ini bisa mengaktifkan seluruh kontrol dalam perusahaan. Ini yang termasuk disiplin ilmu yang kita kembangkan. Kita hidupkan agar semua sistem pengendalian intern ini berjalan baik. Sehingga yang tadinya seolah-olah polisi sendirian, sekarang menjadi *advisor* dari pengendalian," jelas Hari.

Hari berharap, kedepannya keilmuan audit ini semakin diakui, dan menjadi *advisor* dari manajemen, termasuk *partner* strategis dari manajemen. Internal auditor harus memberikan nilai lebih kepada manajemen.

"Sehingga, ke depannya adalah bagaimana internal auditor membantu tercapainya tujuan organisasi, apapun organisasinya. Internal auditor ini menjadi *partner* strategis dari manajemen. Apalagi selama ini ilmu audit yang berkembang, internal auditor kesannya hanya ada di swasta. Inilah yang kita ingin dorong di Indonesia, terutama kepada sektor publik, jika ingin maju, kita geluti," tutup Heri. ■

(ef) foto: oje/ot.

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Pit. Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Bagus Mudjiharjanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Inandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah
- ADMINISTRASI FOTO**
Hasri Mentari
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN & DISTRIBUSI

- PIMPINAN PENERBITAN**
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- WK. PIMPINAN PENERBITAN**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)
- STAFF PRODUKSI**
Subadri, S.E, Mujiono, Barliansyah, Fathurahman
- SIRKULASI**
Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiayah,
Oji, Lamin, Arif
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Ketua DPR RI Tegaskan Dirinya Tidak Terlibat e-KTP

Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan jika dirinya tidak terlibat dugaan korupsi e-KTP yang disebut-sebut merugikan negara sampai Rp 2,3 triliun tersebut. Bahkan Ketua Umum Golkar ini menilai apa yang dilontarkan mantan bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin itu tidak benar dan mengada-ada, karena semua ditangani Komisi II DPR RI.

“ Nama saya dikait-kaitkan dengan korupsi e-KTP itu mungkin karena kondisi sosiologis psikologis Nazaruddin sedang ada masalah dengan partainya, sehingga semua orang dikait-kaitkan. Jadi, saya pastikan pernyataan Nazaruddin itu tidak benar dan mengada-ada,” tegas Novanto pada wartawan menanggapi dugaan Anggota Komisi II DPR RI periode 2011 - 2012 yang diduga terlibat korupsi e-KTP. di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/03)

Menyinggung dugaan adanya pertemuan untuk membahas e-KTP tersebut, Novanto menyatakan pertemuan-pertemuan itu nanti akan masuk masalah teknis dalam penyelidikan di pengadilan. Namun, pertemuan yang disampaikan Nazaruddin itu tuduhan saja.

Kabarinya Pak Novanto meminta jatah 5 - 10 persen kepada pengusaha e-KTP? "Saya waktu itu sebagai Ketua Fraksi Golkar dan membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang atau pendanaan, dan hal itu tidak mungkin saya lakukan. Tidak ada hal-hal lain apalagi saya minta uang atau uang yang beredar ke saya juga tidak pernah ada," ujarnya.

Sebagai Ketua Fraksi Golkar, kata Novanto, semua pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dari Golkar melaporkan ke fraksi, kemudian membahas masalah e-KTP dan diplenokan di fraksi setiap sebulan sekali. "Anggota Komisi II DPR RI FPG kita

minta melaporkan perkembangan yang ada, juga komisi-komisi lainnya. Itu sudah saya sampaikan kepada penyidik KPK waktu diminta klarifikasi dan konfirmasi beberapa waktu lalu. Jadi kepada pleno fraksi Golkar, saya sampaikan bahwa e-KTP kalau itu memang tujuannya baik untuk negara, apalagi merupakan proses *online* demi kepentingan negara dan bisa langsung proses paspor itu sangat baik," demikian Novanto.

Selain itu e-KTP bisa mendeteksi identitas orang yang bermasalah misalnya terkait terorisme, radikalisme dan kejahatan lainnya. Menurut Novanto manfaatnya



Ketua DPR RI Setya Novanto

sangat baik sehingga Golkar mendukung.

Namun demikian adanya dugaan korupsi e-KTP oleh KPK tersebut, Novanto mengapresiasi Ketua KPK Agus Rahardjo, yang telah menyampaikan bahwa kasus itu akan diusut tuntas dan pihaknya mendukung penuh penegakan hukum itu. "Kalau nama saya disebut-sebut justru bisa mengklarifikasi karena waktu saya diperiksa KPK sebetulnya sudah menyampaikan secara detil dan sejelas-jelasnya untuk mempermudah penyidik KPK," jelasnya.

Sementara itu masalah anggaran itu kata Novanto, bukan urusan fraksi, melainkan tugas badan anggaran (Banggar). Dimana sebagai Ketua Fraksi waktu itu

pimpinan fraksi hanya sebatas memberikan kepercayaan kepada Komisi II DPR RI yaitu Chaeruman Harahap, dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Beberapa waktu lalu ada manuver DPR RI untuk merevisi UU KPK seperti mau melemahkan KPK? "Saya kira tidak. Dari dulu wewenang KPK itu yang saya ketahui justru DPR RI mendukung penguatan KPK. Jadi, DPR RI dan pemerintah selalu mendukung penguatan KPK. Nggak ada untuk memperlemah," ungkapnya.

Dengan demikian Novanto prihatin dengan beredarnya nama-nama Anggota Komisi II DPR RI periode 2011-2012, yang selalu dikait-kaitkan dengan korupsi e-KTP tersebut. "Saya sendiri sebagai pimpinan DPR RI sudah dua kali memenuhi panggilan KPK, karena saya menghormati KPK sekaligus untuk klarifikasi. Kalau tidak, maka akan menjadi isu liar dan saya sudah

tegaskan ke penyidik KPK jika saya tidak tahu ada pertemuan antara Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan saya. Jadi, saya percayakan kepada penyidik KPK," katanya. Melalui aliran (follow the money) itu KPK pasti bisa mengetahui, alirannya itu dari mana yang menerima siapa, tanggal dan harinya kapan serta uangnya kemana, siapa yang memberikan? "Pasti KPK itu tahu. Nah, yang penting semua akan menjadi pembuktian. Jadi, jangan sampai salah. Kasihan Anggota DPR RI,

mereka tidak pernah menerima tapi terus diberitakan menerima suap. Kasihan keluarganya, kasihan anak-anaknya. Sebab, kadang-kadang hal-hal yang belum pasti kebenarannya sudah menjadi isu liar. Makanya kita mendukung KPK bekerja secara profesional," pungkasnya. ■



Fadli Zon Terima Aspirasi Gerakan Solidaritas Peduli *Freeport*

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo, Peggi Patrisia Pattipi, dan Awang Ferdian Hidayat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli *Freeport* (GSPF), untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh pekerja di PT. Freeport Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima perwakilan GSPF

Masalah Freeport bukanlah masalah baru, oleh karenanya harus dipertimbangkan juga persoalan sejarah, geopolitik dan budaya setempat

dan juga menguntungkan pihak *Freeport* serta masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut.

"Aspirasi-aspirasi yang ada perlu menjadi pertimbangan dalam proses negosiasi ke depannya. Kehadiran PT. Freeport yang sudah cukup lama, juga perlu menjadi pertimbangan, jangan sampai nanti menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan stabilitas dan faktor-faktor geopolitik lainnya yang ada di sana," pungkasnya. ■

(dep.mp)foto:wan samainias/iv.

“ Kami menerima aspirasi dari sejumlah karyawan PT. Freeport Indonesia yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang menguntungkan karyawan di PT. Freeport. Sekarang ini sudah mulai terjadi pemberhentian dan ada juga yang dirumahkan sekitar 1600 pekerja,” ucap Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (08/03).

Fadli juga menyampaikan bahwa kehadiran mereka berkaitan dengan masih banyaknya kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap merugikan masyarakat di sekitar Mimika. "Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah, agar dalam mengambil kebijakan hendaknya mempertimbangkan berbagai masalah,

baik yang menyangkut masalah ekonomi, khususnya terkait dengan para pekerja, dan juga masalah-masalah lain yang bersifat strategis. Masalah *Freeport* bukanlah masalah baru, oleh karenanya harus dipertimbangkan juga persoalan sejarah, geopolitik dan budaya setempat," tegasnya.

Namun mengingat saat ini sedang masa reses maka Komisi terkait tidak dapat mengadakan rapat, tetapi kata Fadli, aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI akan diteruskan segera kepada Presiden, Menko Maritim, dan juga Menteri ESDM.

Fadli menyatakan, harus ada keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik menguntungkan Pemerintah Indonesia,





Wakil ketua DPR RI bidang Korkestra Fahri Hamzah

“ Ini mengulang peristiwa 47 tahun yang lalu, karena Raja Faisal saat itu juga datang ke DPR RI. Kedatangan Raja Faisal pada waktu itu untuk menyatakan pandangan negaranya tentang dunia, Islam, dan tentang masa depan hubungan antara kedua belah bangsa. Inilah yang kita ulang sekarang ini, Alhamdulillah semua terjadi secara sempurna. Bahkan sekarang telah ada MOU yang telah ditandatangani secara luar biasa,” ucap Wakil Ketua DPR RI bidang Korkestra Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/03).

DPR RI mempunyai tugas untuk mempercantik hubungan yang telah ada, karena di dalam undang-undang tugas DPR RI itu membantu diplomasi pemerintah. "Tugas legislatif hanya memperkuat, kita juga sudah memiliki MOU antar parlemen melalui Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP). Mudah-mudahan dari pidato yang beliau sampaikan, dapat semakin memperkuat hubungan antara dua bangsa, serta memberikan pandangan dalam menyelesaikan masalah-masalah di dunia," ujarnya.

Fahri juga menyampaikan bahwa Ketua Majelis Syuro Arab Saudi telah meminta DPR RI agar segera membentuk dua komite khusus yang menangani masalah investasi dan tenaga kerja, disamping masalah-masalah bilateral lainnya yang menonjol," pungkasnya. ■

(dep.mpp), foto: jayadi/hr.

Pidato Raja Salman Perkokoh Hubungan Dua Negara

Kunjungan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud ke Gedung DPR RI, seakan mengulang peristiwa 47 tahun silam. Raja Salman menjadi raja Arab Saudi kedua yang berkunjung ke Indonesia setelah Raja Faisal Ibn Abdul Aziz As Saud pada tahun 1970.

Anggota DPR RI Sosialisasikan Kota Tanpa Kumuh di Bandung



Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso mensosialisasikan program kotaku

Anggota DPR RI Agung Budi Santoso dari F-Partai Demokrat, Dapil Jawa Barat I, mensosialisasikan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), yang diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR). Pada reses Masa Persidangan III di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, (05/03) lalu.

Program Kotaku merupakan salah satu program yang dicanangkan Rumah Aspirasi ABS (Agung Budi Santoso), yang diharapkan Kota Bandung tidak memiliki wilayah kumuh lagi. Program Kotaku bisa dilakukan dengan cara memperbaiki *drainase*, perbaikan jalan di kampung yang berada di gang-gang.

Menurut Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Provinsi Jabar Ato, anggaran program kotaku yang diberikan Kemen PUPR tahun 2017 sudah turun. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk setiap kelurahan disiapkan Rp.500 juta untuk lokasi-lokasi kumuh. Khusus di Kota Bandung terdapat 80 kelurahan.

Dia menjelaskan, tujuan besar program ini adalah dalam rangka menciptakan kualitas pemukiman yang lebih baik, dan untuk melaksanakan program ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak dalam hal membangun serta harus bersinergi antara pelaku pelaksana.

Diharapkan dengan program tersebut kawasan-kawasan yang kumuh bisa tuntas, baik fisik, lingkungan, ekonomi dan juga sosialnya. Acara sosialisasi dihadiri sekitar 50 orang dari BKM Kota Bandung dan Cimahi dan juga tim fasilitator. ■

(ri.mpi/batam/riw)

Batam Harus Tingkatkan Serapan Anggaran dan Penindakan Penyelundupan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menuturkan bahwa masih banyaknya penyelundupan-penyelundupan barang dan masih adanya pelabuhan-pelabuhan tikus yang terjadi di Kepulauan Riau.

“ Untuk itu dia mengusulkan Ditjen Bea Cukai menggunakan pesawat tanpa awak (DRONE) dalam pengawasan barang masuk apalagi banyaknya pelabuhan tikus di Kepulauan Riau yang sulit dijangkau oleh kapal apapun.

"Dengan menggunakan *drone* kita hanya cukup mengendalikan dari jarak jauh, dan bisa melihat aktivitas apa saja yang di lakukan di pelabuhan-

pelabuhan tikus sehingga penyelundupan bisa dikurangi dan penerimaan negara bisa bertambah." ujarnya setelah melakukan pertemuan bersama Tim Kunker Komisi XI DPR RI di Kantor Kanwil Kemenkeu Batam, pekan lalu.

Soepriyatno menambahkan bahwa pengawasan dan serapan anggaran di Kepri ini sudah cukup baik, dan banyak sekali terobosan-terobosan yang mereka lakukan dan patut didukung, dimana penyerapan anggarannya sekitar 75%.

Namun lanjutnya, jaman sekarang ini beda dengan jaman dahulu, dimana sekarang ini KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang gencar melakukan praktek Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akhirnya serapan anggaran masih kecil.

"Bagi saya, penyerapan anggaran 75% cukup kecil dan rugi kalau itu tidak bisa di dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini untuk pembangunan. Dalam hal ini Presiden harus mengambil solusi bagaimana agar serapan anggaran di Batam bisa lebih tinggi dan bisa



Kunjungan Tim Kunker Komisi XI DPR RI ke Batam

dimanfaatkan oleh rakyat dan Kementerian dalam pengawasan dan penyerapan anggaran bisa bekerja lebih optimal dan tidak ada ketakutan dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Kendala lainnya yang di temui di Batam kata dia, daerah ini membutuhkan banyak sekali anggaran tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat sehingga kinerjanya kurang bagus,"misalkan daerah tersebut membutuhkan 100 tapi hanya di setujui 50, akibatnya kedodoran untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. " ujar politisi F-Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur II.

Dalam kaitan ini Soepriyatno mengusulkan perlu adanya musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), bagaimana nantinya bisa berdiskusi memecahkan problem di masyarakat. "Musrenbang nantinya benar-benar bisa dimulai dari bawah kemudian bisa dilakukan dengan transparan, kredibel sampai ke pusat pun hasilnya jauh lebih baik," jelas Soepriyatno menambahkan. ■

(ezka.rmp) Foto: Azka/odi



Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo

Rahmad Handoyo Apresiasi Pemerintah Bongkar Mafia Cabai

Dugaan adanya mafia yang selama ini mengatur harga cabai ternyata bukan isapan jempol belaka, hal itu terbukti dengan dibongkarnya konspirasi jahat yang dilakukan sejumlah pengepul besar dengan perusahaan pengolah industri makanan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementan, Polri dan KPPU yang berhasil membongkar konspirasi jahat antara pengepul dan perusahaan pengguna cabai rawit merah yang membuat kenaikan harga cabai.

"Permainan jahat pengepul cabai seperti ini memang sudah kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak," kata Rahmad Handoyo dalam berita rilisnya, Senin (06/03).

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, melonjaknya harga cabai yang nyaris tak masuk akal belakangan ini adalah sebuah ironi. Pasalnya, kata Rahmad, petani tidak menikmati keuntungan atas kenaikan harga cabai itu.

"Harus diakui, akibat musim hujan yang berkepanjangan produksi cabai menurun, ditambah lagi harga jual cabai ditingkat petani

sangat rendah bila dibandingkan dengan harga yg harus dibayar konsumen. Harga cabai ditingkat petani hanya berkisar Rp20 ribu, tapi konsumen seperti ibu-ibu rumah tangga harus membeli harga diatas Rp100 ribu perkilogram," ucapnya.

Rahmad juga menyoroti semakin membanjirnya cabai impor, terutama dari negara India dan Cina disejumlah pasar besar di Indonesia. Selain harga lebih murah, cabai kering impor tersebut daya tahannya jauh lebih lama dibanding cabai lokal. "Apapun ceritanya, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produksi petani kita. Kalau tidak, nasib petani kita akan semakin terpuruk," ujar Rahmad.

Adanya praktek kecurangan pengaturan harga yang dilakukan para pengepul cabai sangat merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen, lanjutnya, dan seharusnya yang mengatur harga cabai itu adalah pemerintah bukan pengepul.

**Harus diakui,
akibat musim hujan
yang berkepanjangan
produksi cabai
menurun**

"Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mampu menjaga stabilitas harga cabai, sebab biasanya setelah terjadi lonjakan harga pada bulan-bulan sebelumnya, maka di bulan berikutnya bisa jadi harga turun karena adanya peningkatan pasokan. Untuk itulah di perlukan regulasi yang tepat dalam menjaga stabilitas harga cabai ini, dimana ketika pasokan meningkat, tetapi harga tetap normal dan tidak merugikan petani dan konsumen," tegasnya. ■

(dep.mp/foto: iwan armanias/iw.)

DPR RI Ingin Wisatawan ke Sumbar Meningkat

Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau potensi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), salah satunya yakni rumah adat gadang di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau yang terletak di kota Padang Panjang.



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau pariwisata Sumbar

Komisi yang membidangi Pariwisata ini mengagumi keindahan alam dan budaya adat istiadat Sumbar yang terjaga oleh masyarakatnya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan potensi wisata yang ada di Sumbar diharapkan dapat menjadi daya tarik dan meningkatnya wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Allah menganugerahkan alam Sumbar yang begitu indah, dan ragam budaya adat istiadat setempat membuat Sumbar menjadi

salah satu daerah tujuan wisata yang patut dikunjungi di Indonesia," katanya, di Padang Panjang, Minggu (26/02).

Politisi Golkar ini menjelaskan, kunjungan Tim Komisi X DPR RI ini untuk menyerap aspirasi dan melihat secara langsung kondisi ruang lingkup bidang kerjanya yaitu pendidikan, olahraga, dan pariwisata.

"Kita ingin mendengarkan secara langsung masukan dari Pemerintah Daerah dan melihat secara langsung potensi dan masalah untuk meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan yang datang ke Sumbar," katanya.

Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Padang hingga Bukittinggi yang melewati Kota Padang Panjang terbilang sempit. Ini menyebabkan sering terjadi kemacetan yang sangat panjang.

"Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama untuk mencari solusi ini, karena wisatawan akan enggan kesini jika macetnya bisa berjam-jam," katanya. ■

(es) foto : Agung/mr.

Badan Keahlian DPR RI Apresiasi WTP Pemkot Pariaman

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kota Pariaman atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemkot Pariaman, yang telah dilakukan oleh BPK RI.

“ Kami mengaspresiasi Pemerintah Daerah Kota Pariaman karena telah berhasil mendapatkan penilaian WTP dari BPK, dengan penggunaan Program Aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” katanya di Kantor Walikota Pariaman Genius Umar, Kamis, (02/03).

Helmizar menjelaskan, pertemuan ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 serta persiapan penerapan basis akrua TA 2016.

"Kami memerlukan data dan informasi mengenai penggunaan SAP yang berbasis akrua, serta kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi termasuk regulasi dan SDM," paparnya.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, pemberlakuan sistem



Kepala Pusat PKAKN BKD gelar pertemuan dengan Pemkot Pariaman

akuntansi berbasis akrua merupakan upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini merupakan amanah peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 terkait penerapan sistem akuntansi berbasis akrua.

"Dalam menyongsong penerapan sistem akuntansi berbasis akrua efektif yang telah

dilaksanakan 1 Januari 2015, Pemkot telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 20 tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Pariaman No. 21 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman," jelasnya.

Inventaris Aset Masih Terkendala Sekda Kota Pariaman Indra Sakti mengatakan, untuk pelaporan keuangan di Pemkot Pariaman tidak ada kendala, dikarenakan SDM sudah cukup baik dalam menyusun pelaporan keuangan kota Pariaman. Namun persoalan yang terjadi pada Kota Pariaman yaitu terkait inventarisasi aset.

Dia menjelaskan, sampai ini masih ada aset Pemerintah Kabupaten Pariaman belum diserahkan ke Kota Pariaman. Hal tersebut disebabkan Kota Pariaman dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.

"Sampai sekarang pun asetnya sudah 15 tahun yang seharusnya sudah diserahkan pada Kota Pariaman masih saja ada yang belum diserahkan. Ada aset yang strategis bagi Kota Pariaman, tapi belum diserahkan oleh Kabupaten Padang Pariaman. Tapi kita bukan itu, kalau dikasih ya kita terima, kalau tidak yah itu tergantung pada pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Kita lanjut saja pembangunan," ujar Indra Sakti.

Dia menambahkan, Kota Pariaman juga telah melakukan sensus aset yang bertujuan mendata dan merinci aset yang dimiliki kota pariaman. "Hal itu juga telah dilaporkan oleh SDM kita yang telah memiliki keahlian di bidang Akuntansi Keuangan Negara khususnya di bidang IT (Information technology). ■

(as), Foto : Dek.Pri

Komisi III DPR RI Saksikan Pemusnahan Barang Bukti di Polda Jatim

Jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Reskoba) Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polres seJatim memusnahkan barang bukti (BB) berbagai jenis narkoba, dari hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 yang nilainya mencapai Rp 71,347 miliar.



Komisi III DPR RI memusnahkan BB Narkoba di Polda Jatim

Pemusnahan barang bukti terdiri dari sabu-sabu, ganja, *happy five* (psikotropika), dan ekstasi itu dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Machmud Arifin dan disaksikan oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di lapangan apel Mapolda Jatim, Kamis (02/03).

"Pemusnahan ini merupakan bukti bahwa kita serius dan akan terus memerangi narkoba," kata Irjen Machmud Arifin, yang dalam pemusnahan juga disaksikan BNNP Jatim, Bea Cukai, Kejati Jatim, TNI, dan Satpol PP.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi kinerja Ditreskoba

Polda Jatim beserta jajaran Polres se-Jatim dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017. Selain itu juga mengapresiasi sinergi yang baik antara Ditreskoba dengan BNNP dan Bea Cukai.

"Prestasi yang diraih jangan membuat cepat puas, tapi justru memicu semangat untuk lebih keras lagi dalam memberantas narkoba, tentu bersinergi dengan "stakeholder lain," imbuhnya.

Lebih lanjut Ahmad Basarah menjelaskan, pada saat menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba, ada dua anggota polisi dan dua petugas sipir lembaga pemasyarakatan yang terlibat narkoba.

Karena itu harus jadi perhatian penting, jangan sampai membuat jelek nama institusi penegak hukum, yang seharusnya menjaga dan memberantas narkoba malah terlibat transaksi barang haram tersebut.

"Operasi narkoba ini membuktikan keseriusan aparat keamanan dalam memberantas narkoba," tambah Ahmad Basarah sambil mengingatkan, narkoba itu merusak generasi penerus bangsa dan bisa menyerang siapa saja. Tidak mengenal apakah itu keluarga, saudara, teman ataupun jabatan. Karenanya masyarakat harus turut membantu melakukan pemberantasan narkoba. ■

(andri/hic)

DPR RI Dorong Peningkatan Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik

Perempuan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu peradaban. Apabila perempuan berdaya dan sejahtera, maka keluarga akan merasakan dampak positifnya, sehingga masa depan suatu peradaban lebih terjamin. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ketika dihubungi Parlemen, Rabu (08/3).

Politisi F-Gerindra itu menilai, saat ini kepemimpinan perempuan Indonesia sudah lebih maju dari sebelumnya, hal ini terlihat dari banyak munculnya pemimpin perempuan di berbagai bidang. Namun, sayangnya hal itu kurang terlihat dalam bidang politik. Menurutnya, keterlibatan perempuan di bidang politik masih rendah.

"Tentunya, masih banyak PR yang harus dilaksanakan, kita masih harus mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik, seperti keterwakilan di DPR RI," ungkap politisi yang akrab dipanggil Sara itu, terkait Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

Sara menilai, sebagian kalangan masih mengasumsikan bahwa beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, dan menganggap seorang wanita dengan status ibu muda hanya akan menghambat perkerjaan. Bahkan, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya ketahanan keluarga akibat masalah ekonomi.

"Padahal, jika perempuan berdaya dan dapat membantu menghidupi keluarganya, saya yakin dengan keluarga-keluarga yang sejahtera, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat," sergah Sara.

Dirinya berharap, ke depannya ada peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap perempuan. Mengingat, masih banyak ditemui bentuk perilaku diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, ia juga menginginkan adanya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan alokasi anggaran dalam merefleksikan pemahaman kesetaraan *gender* dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan. "Sayangnya, perhatian itu masih jauh dari ideal," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII DPR RI Dwi Astuti Wulandari (F-PD) mengatakan saat ini pemahaman terhadap hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemui sampai



Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati

hari ini. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan grafik kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya.

"Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, supremasi hukum harus ditingkatkan," tegas politisi yang akrab disapa Ade itu.

Disamping itu politisi asal dapil DKI Jakarta itu mengimbau kepada Pemerintah agar memberikan prioritas pendidikan, akses kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. "Tanpa pendidikan yang bagus, tanpa kesejahteraan yang baik dan keadilan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kita optimis ke depan, perempuan Indonesia adalah bagian dari solusi bukan masalah bagi bangsa ini," pungkasnya. ■

(enn/sf)

Pentingnya Edukasi Politik Sejak Usia Dini



Suasana pertemuan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan siswa SD Islam Tepadu Insan Mandiri Jakarta



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pendidikan politik kepada anak usia dini dirasa penting. Namun, pemberian edukasi politik harus disesuaikan dengan kondisi dan usia anak. Pendidikan politik bisa dilakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui cara orang tua mengambil keputusan dan berkomunikasi baik dengan anak, bisa menjadi salah satu pilihan dalam memberikan pemahaman politik kepada anak.

Demikian dikatakannya usai memberikan materi tentang DPR RI pada 161 siswa-siswi Kelas 4-5 SD Islam Terpadu "Insan Mandiri" Jakarta, di Operation Room DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (03/03).

"Sebuah langkah awal yang sangat bagus dari Setjen DPR RI, memang lembaga parlemen ini harus menyediakan sebuah sarana dan prasarana yang memungkinkan setiap warga negara sejak usia dini bisa mendapatkan pembelajaran mengenai proses politik yang ada di DPR RI," kata Misbakhun yang didampingi Kasubag Humas Erna Agustinna.

Politisi Fraksi Golkar itu menambahkan, jika edukasi politik penting diketahui baik secara fisik maupun non fisik, seperti apa saja yang ada di DPR RI. Sehingga sejak usia dini, siswa-siswi bisa mengerti tentang fungsi, tugas, hak, dan kewajiban dari DPR RI. Baik itu individu Anggota DPR RI

maupun tugas-tugas DPR RI secara kelembagaan. Sehingga diharapkan mereka memiliki pentingnya kesadaran politik.

"Pendidikan politik kepada anak bisa dicontohkan melalui keberanian anak dalam menunjukkan dirinya kepada orang banyak, seperti mengajukan pertanyaan saat berdiskusi dan berani mengambil keputusan ketika dalam keadaan genting. Hal ini dirasa cukup ampuh untuk mengasah kepercayaan diri anak," terangnya.

Misbakhun pun mencoba menerapkan hal tersebut kepada siswa-siswi SDIT Insan Mandiri Jakarta dengan menunjuk beberapa anak untuk maju ke depan memberikan pertanyaan serta menanyakan siapa saja yang menjadi ketua kelas, tujuannya yaitu mengasah keberanian si anak agar mau menampilkan diri di hadapan umum.

Legislator Dapil Jatim II itu menuturkan, edukasi politik menjadi salah satu hal vital di zaman yang serba modern, maka dari itu perlunya wawasan luas mengenai politik. Dalam paparannya, Misbakhun memberikan materi mengenai tugas dan fungsi DPR RI, sekaligus mengenai struktur kelembagaan negara. Siswa-siswi sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan kepada anggota badan legislasi itu.

Pendidikan politik kepada anak bisa dicontohkan melalui keberanian anak dalam menunjukkan dirinya kepada orang banyak

"Harapan saya setelah ini, semoga menjadi terekam dalam pemikiran mereka. Siswa-siswi akan tahu bahwa Anggota DPR RI itu tugasnya apa saja. Baik dalam konteks kenegaraan maupun konteks konstitusi. Kemudian dalam peran ini ada hak-hak mereka sebagai masyarakat. Sehingga terbangun kesadaran yang akan mewarnai mereka sampai ke depan dan menjadi masyarakat yang baik," pungkasnya. ■

(pww/mp), foto : mulya/hr

DPR RI Dukung Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

DPR RI mendukung penguatan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan memberikan wewenang penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang terbukti melanggar hukum, yang dilakukan oleh kartel, mafia dalam semua jenis usaha untuk menjaga kepentingan umum sehingga tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

“ Hanya saja konsekuensi penguatan itu adalah dibutuhkan tambahan anggaran dan tetap kerjasama dengan aparat kepolisian. Sebab, kalau KPPU seperti saat ini, mereka akan kesulitan mendapatkan data dan informasi tentang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terutama bagi perusahaan besar,” tegas Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI FPDIP dalam forum legislasi “Berantas Kartel, Perlukah KPPU Diperkuat?” bersama Mukhamad Misbakhun Anggota Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/03).

Sebagai dalam kasus Honda Vs Yamaha yang bertekad maju ke pengadilan karena



Suasana diskusi Forum Legislasi

bukti-bukti yang didapatkan seperti petunjuk dan email tidak kuat. Sementara untuk wewenang penyadapan tidak diberikan oleh

aparat kepolisian.

Karena itu, denda sebesar 1 - 5% itu tidak perlu membuat investor takut selama tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. “Jadi, kalau usahanya dilakukan dengan jujur, tidak menghambat persaingan, tidak melawan hukum, dan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara, maka investor tidak perlu takut,” pungkasnya.

Sementara, menurut Misbakhun Revisi UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang KPPU ini sudah pada tahap harmonisasi di Panja dengan semangat untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu RUU ini bukan rezim “criminal justice” mengkriminalisasi pengusaha melainkan hanya untuk mencari keadilan atas usaha yang tidak sehat. Makanya RUU ini harus menjelaskan definisi kartel. Termasuk *merger bank* dan usaha lainnya.

Soal denda kata politisi Golkar itu, dulu *microsoft* didenda Rp 14 triliun tetap dibayar dan jumlah denda itu jauh lebih kecil dibanding aset yang dimiliki perusahaan tersebut. “Jadi, untuk denda ini masih mencari formulasi yang terbaik, atau maksimal berapa dari nilai aset perusahaan tersebut,” pungkasnya. ■

(scj)/foto:runi/iw.



Tim Komisi VI DPR RI meninjau proyek jalan tol Palindra

Komisi VI DPR RI Dukung Pencapaian Pembangunan Tol dan LRT Palembang

Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau proyek jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) yang merupakan bagian dari jalan tol trans Sumatera, Selasa (28/02).

Ruas tol ini terdiri dari 3 seksi dengan total panjang 16,8 kilometer. Tim Kunker Komisi VI DPR RI menyoroti kendala yang masih dihadapi yaitu pembebasan lahan.

"Jalan tol Palembang Indralaya ini ada tiga seksi dimana seksi satu itu pembebasan lahannya itu sudah 100% sedang di 2 seksi lain masih terkendala. Persoalannya ini bukan di tangan Hutama Karya selaku kontraktor, tetapi menyangkut koordinasi dengan institusi lain yang berperan sebagai pembebasan lahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus menjalin koordinasi yang solid karena Hutama Karya Waskita Karya memerlukan *support* dari semua pihak terkait," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas

Nasrullah Zubir yang memimpin Tim Kunker.

Mengenai kesiapan menghadapi lebaran mendatang konstruksi jalan yang sejauh ini telah dibangun sepanjang 7,75 Km (Palembang Pamulutan) akan siap digunakan.

Setelah meninjau tol tim melanjutkan kunjungannya ke proyek kereta ringan *Light Rail Transit* (LRT) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (persero). "Pembangunan LRT ini kan merupakan fokus pemerintah di bidang infrastruktur setelah MRT di Jabodetabek. Kita berharap pembangunan LRT ini bisa tepat waktu. Kami mengontrol progress pembangunan yang sampai saat ini sudah sampai 30%" ujar Anggota Tim Kunker DPR RI Dapil Sumsel II Wahyu Sanjaya.

Dijelaskannya pembangunan LRT ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan 2016-2017 menjadi bagian kelengkapan infrastruktur yang digunakan selama Pesta Olahraga Se-Asia raya yaitu *ASEAN Games 2018*

"Kami berharap kesemuanya dapat rampung tepat waktu pertengahan Juni 2018 dalam rangka menghadapi penyelenggaraan *ASEAN Games* di Palembang karena itu merupakan tujuan jangka pendek keberhasilan proyek ini," ujar Wahyu.

Adapun dalam jangka panjang, LRT akan mempermudah mobilisasi masyarakat Palembang dan sekitarnya dengan moda transportasi yang lebih nyaman, lebih terjangkau dan modern. ■

(Ray,mp) fotocray/mr.

Setjen DPR RI Targetkan Tingkat Kepuasan Layanan Lebih 73,66 persen

Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Sekretariat Jenderal (Setjen) telah mencapai 73,66 %. Demikian hasil survey yang dilakukan tahun 2016 terhadap seluruh *stakeholder* layanan yang diberikan Setjen termasuk kepada Anggota DPR RI. Sedangkan Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Badan Keahlian (BK) telah mencapai 72,65%.

“Capaian ini terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” demikian dikatakan Plt. Sekjen DPR RI Achmad Djuned pada acara Pembukaan Rapat Kerja Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Bogor, Jumat (03/03).

Menurut Djuned, ada dua target Setjen dan BK yang harus dicapai ke depan yaitu meningkatkan kualitas kepuasan pengguna layanan, khususnya kepada Anggota DPR RI. Selain itu, meningkatkan nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari semula CC menjadi BB dengan berpedoman pada arah kebijakan Setjen dan BK yang dioperasionalkan dalam menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan Anggaran Tahun 2018.

Langkah-langkah strategis operasional perencanaan Anggaran tahun 2018 dimulai dengan menetapkan target *output* per Biro/Pusat dan Inspektur hendaknya dilakukan secara cermat, terukur dan memiliki keterkaitan dengan program Eselon I. Demikian juga dengan *action plan* dan



Foto bersama acara Pembukaan Rapat Kerja Anggaran 2018 Setjen DPR RI dan BKD

cash plan yang telah ditetapkan serta dapat menekan deviasi antara realisasi dengan realisasi.

"Langkah-langkah strategis tersebut akan dapat melakukan pembatasan revisi menjadi 4 kali dalam setahun," kata Djuned menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keahlian DRR RI, K. Johnson Rajagukguk meminta untuk meningkatkan koordinasi antara unit kerja di lingkungan Sekretariat dan Badan Keahlian agar tidak terdapat usulan kegiatan yang bukan merupakan tupoksinya.

"Tidak boleh lagi ada kantong semar"

dalam perencanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2018. Penyusunan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil (efisien), tepat sasaran (efektif), dan terukur (akuntabel)," pinta Deputi Persidangan, Damayanti dalam Rapat Kerja yang digelar mulai tanggal 3-5 Maret 2017 dan dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III dan IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Sedangkan Inspektur Utama, Setyanta Nugraha, menjelaskan posisi pengawasan internal yang berada di depan lampu merah sebagai *early warning system* dengan menetapkan tiga kebijakan. Yaitu, penguatan tata kelola pengawasan, pengawalan kebijakan Setjen dan Badan Keahlian, serta membangun wilayah bebas korupsi.

Mengakhiri sambutan pembukaan rapat kerja, Ahmad Djuned berharap agar perencanaan kegiatan dan anggaran yang tertuang melalui *action plan* dan *cash plan*, dapat dilaksanakan dengan disiplin dan konsisten sehingga diharapkan anggaran akan terserap dengan optimal, efektif dan efisien. ■

(dj,mp) Foto: dj/od.

Kontrak Sewa Kapal Terapung Pembangkit Listrik MVPP Jangan Diperpanjang

Kontrak sewa Kapal Terapung Pembangkit Listrik *Marine Vessel Power Plant* (MVPP) berdaya 60 Mega Watt (MW) dengan Turki diharapkan jangan diperpanjang. Pasalnya, kebijakan ini hanya sementara untuk menutupi kekurangan listrik yang ada.

“ Kebijakan sewa kapal listrik apung dengan durasi 5 tahun ini, bisa dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik yang lebih murah. Sehingga PLN tidak perlu memperpanjang kontrak sewa lagi. Nantinya pun tidak terlalu banyak untuk mensubsidi,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat Kunker meninjau Kapal Terapung Listrik di Kupang, NTT, Senin (27/02).



Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau kapal terapung pembangkit listrik

Menurut Politisi F-Golkar ini, memang diakui ada penghematan sekitar 100 milyar/tahun dengan kebijakan ini, tapi karena sebelumnya PLN menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang biayanya justru jauh lebih mahal.

Sedangkan, jika membangun PLTU biaya operasinya lebih murah. "Jika PLTU selesai dibangun, Kapal Apung Listrik bisa dipindahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan," terangnya.

Selain itu, kata Gde Sumarjaya,

perencanaan PLN untuk memenuhi listrik 100 persen di NTT baru bisa dicapai pada tahun 2027. Menurutnya ini terlalu lama, butuh perencanaan kembali paling cepat 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, perencanaan PLN dalam pembangunan listrik di NTT ini belum baik, makanya mengambil kebijakan sewa kapal apung listrik ini. Pada prakteknya

memang perencanaan di lapangan banyak masalah.

"Harusnya kalau perencanaannya cukup, tidak akan terjadi kendala seperti ini. Masa sudah lama merdeka masih seperti ini. Saya sepakat dengan pembangunan PLTU yang sudah dirancang, dampak negatifnya juga perlu dikurangi," tutupnya.

Sementara itu, Dir.Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon, memaparkan kebijakan menyewa Kapal

Apung Listrik ini hanya sementara karena defisit listrik. Rencana ke depan, setelah LMVPP masuk, pihaknya tengah membangun PLTU di beberapa daerah.

Ia menambahkan, pada tahun 2020 akan memiliki cadangan sekitar 30 MW jika pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berjalan dengan baik. Sehingga pada tahun tersebut, kontrak dengan Turki terkait listrik ini bisa dihentikan atau tidak diperpanjang. ■

(ik.mpr) foto: jake/mr.

Komisi XI DPR RI Maklumi Berbagai Kendala Kanwil Kemenkeu Papua

Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Papua terkendala berbagai hambatan dan tantangan antara lain kondisi geografis yang demikian luas, minimnya infrastruktur dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Terhadap kondisi tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi XI M. Prakosa dapat memahami hal tersebut.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakoso

“ Kalau kita bicara hambatan yaitu infrastruktur dan SDM kita sudah paham. Karena memang *speed of control* atau *covery* Kantor Wilayah Kementerian Keuangan terlalu besar,” kata Prakoso usai pertemuan tim dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP, di Jayapura, Senin (27/02)

la menjelaskan, untuk Dirjen Pajak saja satu Kanwil melingkupi 3 provinsi. Bahkan Dirjen Bea dan Cukai melingkupi empat provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

“Itukan luasnya pun seperempat dari luas wilayah Indonesia. Geografis yang demikian luasnya ditambah dengan kondisi dan jumlah pegawai juga terbatas. Memang kami menyadari hambatan-hambatan ini,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Prakosa, hasil dari pertemuan ini akan dibawa ke tingkat pusat, untuk dicarikan jalan atau solusi untuk perbaikan-perbaikan ke depan.

Tim Kunjungan Kerja Komisi XI ke Provinsi Papua selain melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP, juga melakukan pertemuan dengan BI, OJK, bank-bank pemerintah dan swasta.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI yakni IGA. Rai Wirajaya, Indah Kurnia, Andreas Eddy Susetyo, Ana Muawanah, Krisna Mukti, Refrizal, Amir Uskara, dan Donny Imam Priambodo. ■

(es.mp) Foto : Suci/sc.

Irtama Setjen DPR RI Buka acara Sosialisasi PMPRB

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha membuka acara Sosialisasi Peningkatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Acara yang digelar di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta itu dihadiri oleh para pejabat Eselon Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

“ Setiap tahun kita melaksanakan penilaian mandiri dan pelaksanaan rekomendasi birokrasi, artinya setelah setahun teman-teman melaksanakan kinerjanya, dalam konteks reformasi birokrasi, maka tiba saatnya diawal tahun antara bulan januari hingga maret, kita akan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” ucap Setyanta Nugraha dalam sambutannya, Senin (06/03).



Suasana sosialisasi PMPRB yang di selenggarakan Inspektur Utama

Untuk mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilakukan, pada kesempatan itu Setyanta Nugraha *refresh* kembali proses yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. la menjelaskan bahwa penilaian PMPRB itu dilakukan secara mandiri, yang mencakup penilaian Pengungkit dan Hasil.

“Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya yang sangat menentukan keberhasilan. Sementara hasil adalah kinerja yang dibuat dari komponen pengungkit. Apa yang dilakukan teman-teman selama dalam setahun itu adalah pengungkit, apakah itu membuat instrumen regulasi atau melaksanakan berbagai kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu pasti harus ada perencanaannya,” paparnya.

Menurutnya, seringkali kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak mempunyai perencanaan dan regulasi yang memayungi kegiatan tersebut.

“Oleh karena itulah, pada awal tahun

kemarin kami mencanangkan untuk tahun 2016 sebagai tahun regulasi. Hal itu supaya kita dapat membereskan terlebih dahulu, agar semua yang kita lakukan memiliki landasan hukum dan regulasinya,” ujar pria yang akrab disapa Toto itu.

Sementara yang dimaksud dengan hasil adalah apa yang sudah dilakukan dan dinilai berdasarkan *survey*. Toto juga menerangkan, secara umum proses PMPRB itu paling lama 3 bulan, yakni mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan yang dilakukan secara *online* karena berbasis *website*.

“Kita harus mengetahui prinsip-prinsip penilaian PMPRB itu, dengan kita mengetahui mekanisme dan prinsip penilaian, maka kita bisa mempersiapkan apa yang seharusnya kita siapkan supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Sebab terkadang kita menganggap bahwa bila telah melakukan suatu kegiatan, maka seolah-olah kegiatan itu sudah selesai. Padahal itu adalah merupakan *include* dari proses perbaikan berikutnya,” tegasnya. ■

(dep.mp) Foto : Arief/fo

Pandeglang Lumbung Perikanan di Provinsi Banten

Kabupaten Pandeglang menjadi daerah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) karena daerah ini memiliki kekayaan alam laut yang melimpah. Bahkan dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Banten, bisa menjadikan Pandeglang sebagai daerah Lumbung Ikan selain telah menjadi Lumbung Pangan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau lokasi Budidaya Keramba Apung di Tanjung Lesung, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (28/02).

Desa Tanjung Jaya dikenal memiliki daerah pantai yang terkenal dan luas yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata maupun pengembangan budidaya perikanan. Salah satu budidaya yang dikembangkan di Desa Tanjung Jaya adalah budidaya Ikan Kerapu yang ada di Kp. Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Dengan kondisi geografis dan panjang pantai terluas di Provinsi Banten, maka Kabupaten Pandeglang selain menjadi lumbung pangan, Pandeglang juga akan menjadi lumbung ikan," tambahnya.



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau lokasi budidaya keramba apung

Di bidang kelautan perikanan, Herman memaparkan, panjang pantai Pandeglang sangat luas, mengandung banyak sumber daya laut di luar sektor pariwisata. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan dikenal dengan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), di situ ada pelabuhan, pengolahan, dan disana sangat komplit untuk dijadikan *one gate service* dibidang perikanan, sehingga sangat cocok diterapkan di Pandeglang.

Dengan begitu, lanjutnya, diyakini bahwa arah untuk mencapai Pandeglang sebagai lumbung ikan akan terwujud. Lebih dari itu, dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat juga dipastikan terangkat. "Pangsa pasar di Selatan Pandeglang menjadi daerah kunjungan wisata. Saya kira ini bisa menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat," ungkapnya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimiyati mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR RI beserta jajaran ke Kabupaten Pandeglang. Dirinya pun menyambut baik wacana Komisi IV DPR RI yang mengusulkan agar Kabupaten

Pandeglang menjadi daerah SKPT, dan mendorong pembangunan Pelabuhan Perikanan segera berdiri di Pandeglang.

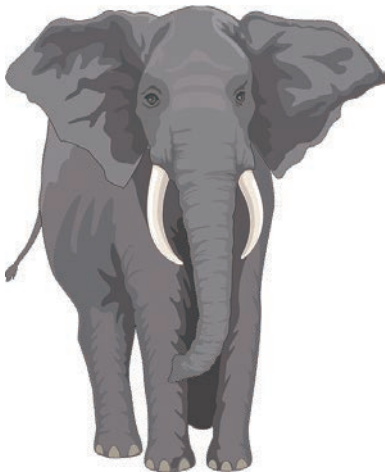
"Kami berharap industri perikanan dan pelabuhan perdagangan di Kabupaten Pandeglang segera terwujud, dan salah satu mitra Kementerian Perikanan ini adalah Komisi IV DPR RI," ujarnya.

"Ibu punya Pekerjaan Rumah (PR) Pelabuhan Perikanan yang terbengkalai, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi. Ibu minta agar Pandeglang menjadi industri perikanan nasional dengan panjang pantai terpanjang di Banten," ujar Irna.

Akan tetapi, lanjutnya, kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar lebih tanggap dalam menyikapi usulan yang disambut baik oleh legislatif maupun eksekutif di pusat.

"Sekarang SKPD kawal usulan program itu. Ibu tidak bisa konsentrasi lagi ke sana karena harus mengurus yang lain. SKPD harus benar-benar memback up ibu dan *follow up*," pesannya. ■





Lampung Miliki Banyak Potensi Pariwisata

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi menilai, provinsi Lampung memiliki banyak potensi pariwisata yang luar biasa. Bahkan, potensi itu tidak kalah dengan daerah lain. Namun ia mengakui, pengembangan harus terus dilakukan, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga Pemerintah Pusat.

Demikian dikatakannya di sela-sela kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Lampung, usai meninjau Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur, Senin (27/02). Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (F-Gerindra).

"Saya sudah menyadari sejak lama, Lampung punya banyak potensi pariwisata, seperti Pantai Tanjung Setia, Pantai Gigi Hiu, Pulau Kiluan, Pulau Pahawang, dan potensi lain yang tidak kalah dengan daerah lain," jelas Dwita.

Namun politisi F-Gerindra itu menggarisbawahi, pengembangan berbagai potensi itu harus difokuskan oleh Pemerintah Daerah, dengan didukung oleh Pemerintah Pusat. Ia melihat, tidak semua potensi pariwisata dapat dimaksimalkan sekaligus, namun bertahap.

"Pemerintah Pusat bersama Pemda, harus fokus pada potensi yang akan dikembangkan. Tidak bisa sekaligus beberapa potensi pariwisata digarap secara bersama. Satu per satu. Perbaiki dulu secara keseluruhan untuk infrastruktur. Sehingga perbaikan bisa dimaksimalkan," jelas Dwita.

Dwita pun yakin, potensi pariwisata Lampung bisa bersaing dengan daerah lain. Bahkan ada beberapa pariwisata yang belum tentu ada di tempat lain, seperti lomba-lumba di Pulau Kiluan, atau pasir timbul di Pantai Sari Ringgung. Keduanya terletak di Kabupaten Pesawaran.

"Sekarang tinggal mengemas agar lebih baik. Ini menjadi tugas Pemda. Nanti Pemerintah Pusat tinggal mempromosikan," dorong Politisi asal dapil Lampung itu.

Hal senada diungkapkan Gubernur



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi

Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Ia memaparkan, daerah yang dipimpinnya memiliki banyak potensi pariwisata. Seperti Pulau Pisang, Pahawang, Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, Danau Ranau, hingga Pantai Tanjung Setia.

"Bahkan, di Pantai Tanjung Setia merupakan salah satu lokasi terbaik untuk selancar air. Hal ini pun menarik para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara untuk berkunjung," jelas Gubernur Lampung.

Namun di satu sisi, Gubernur Lampung berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan untuk pengembangan potensi pariwisata Lampung. Seperti akses transportasi, hingga penambahan panjang landasan di Bandara Pekon Serai, di Pesisir

Lampung punya banyak potensi pariwisata, seperti Pantai Tanjung Setia, Pantai Gigi Hiu, Pulau Kiluan, Pulau Pahawang, dan potensi lain yang tidak kalah dengan daerah lain

Barat. Sebagaimana diketahui, bandara ini menjadi salah satu akses ke Pantai Tanjung Setia.

"Di sana masih bandara perintis, *runway* perlu diperpanjang. Sehingga bisa digunakan untuk penerbangan reguler," jelas Gubernur Lampung, sembari memastikan pihaknya saat ini sedang menggalakkan sektor pariwisata. ■

(efi) foto: sojanyo.co

Penyerapan Anggaran Jabar Lambat

Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat didampingi 16 orang Anggota Dewan, Senin (27/2). Selama di daerah itu Tim melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan Tim Komisi XI DPR RI disambut Kepala Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan BPKP dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

"Berdasarkan beberapa temuan BPK RI bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun daerah. Bagaimana penyerapan anggaran APBD Provinsi Jabar, apakah terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran atau tidak dan langkah-langkah apa yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jabar,"

ungkap Marwan saat membuka rapat di Gedung BPK Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, politisi dari Partai Demokrat menegaskan bahwa kunjungannya dalam masa reses ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kesimpangsiurannya masalah penyerapan anggaran daerah yang telah berjalan 3 tahun terakhir.

Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa menanggapi pertanyaan Tim Komisi XI DPR RI tentang upaya yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa keuangan) Jawa Barat dalam melakukan *empowering* terhadap Pegawai Pemerintah Provinsi Jabar sehingga penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar menggunakan SDM sesuai kompetensi dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pihaknya juga meningkatkan kompetensi melalui diklat dan bimtek dan jika diperlukan melakukan pendampingan oleh BPKP dalam perbaikan system dan penyajian laporan keuangan daerah.

Selain itu juga mendorong Pemda



Tim Kunker Komisi XI DPR RI dipimpin Marwan Cik Asan saat kunjungan kerja ke Prov. Jabar

untuk melakukan studi banding dengan Pemda lain yang telah lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jabar Deni Suardini menyampaikan

belum dilaksanakannya Siskeudes tersebut adalah tidak adanya anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pendampingan pelatihan perangkat desa," jelas Deni menambahkan. ■

langkah langkah yang sudah dilakukan oleh BPKP agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Langkah-langkah yang dilakukan perwakilan BPKP Provinsi Jabar adalah dengan menyediakan *tools* berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*siskeudes*) bekerjasama dengan Kemendagri serta melakukan pelatihan/bimtek implementasi Siskeudes kepada perangkat desa.

"Hambatan utama

(hr.mpi) foto : eka hindra/hr

Masalah Batas Wilayah Pengaruhi Penyelenggaraan Pilkada di NTB

Ketidajelasan masalah batas wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pilkada di provinsi tersebut. Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Al Muzzammil Yusuf saat tinjauan langsung ke lapangan di Lombok Barat, NTB, Senin (27/02).

“Ketidajelasan itu dimulai sejak adanya pemekaran wilayah, yang akhirnya menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan,” ucap politisi PKS itu.

Muzzammil mengatakan, ketegasan Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap Pilkada, sebab ada kasus dimana orang yang bisa memilih dua kali dalam



Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sekolah Ramah Anak Gorontalo

Delegasi Komisi VIII DPR RI mengunjungi SMAN 1 Gorontalo yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak. Inilah sekolah yang menjunjung tinggi penghormatan kepada para anak yang menjadi siswa sekolah.

Kunjungan ini merupakan rangkaian dari agenda kunjungan kerja pada Senin (27/02). Deding Ishak Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang memimpin delegasi ini, mengapresiasi SMAN 1 Gorontalo yang telah menerapkan pola pendidikan kebajikan di sekolah. "Sekolah ini telah menerapkan akhlakul karimah. Dan saya apresiasi tinggi para guru yang telah menyelenggarakan pendidikan berkualitas," nilai Deding.

Kepala SMAN 1 Gorontalo menjelaskan, ini adalah sekolah pertama di Provinsi Gorontalo yang ramah anak. Tidak hanya itu, sekolah ini juga ramah lingkungan. Bahkan, SMAN 1 Gorontalo juga ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata nasional dan akan menuju sekolah ekowisata Asia. Saat ini jumlah siswanya lebih dari 800 orang.

Saat pertama tiba di sekolah tersebut, delegasi Komisi VIII DPR RI langsung disambut dengan tarian dan nyanyian khas Gorontalo dari para siswa. Sambutan sangat meriah sebagai penghormatan atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. ■



Delegasi Komisi VIII saat mengunjungi SMAN 1 Gorontalo

(mh/so)/fotojaka/ivv



Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi NTB

Pilkada yang berbeda. "Hal itu terkait dengan masalah batas wilayah yang tidak jelas hingga menjadi sebuah konflik panjang," ujarnya.

Sementara itu terkait persoalan dana desa, Muzzammil menyampaikan bahwa masih ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa, yakni dalam bentuk administrasi serta kemampuan desa mengelolanya.

"Namun salah satu desa yang kita kunjungi, yakni Desa Sesela, itu cukup baik pengelolaannya. Pendamping desanya ikut hadir dan dana desa yang diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Desa Sesela mengelola aliran dana desanya untuk membuat jembatan, gedung yang bisa disewakan untuk pendapatan desa, dan peran aktif pemuda dalam membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya, jelas Muzzammil.

"Desa Sesela dapat menjadi contoh yang bagus. Jangan sampai dana desa yang turun itu hanya menjadi suatu bancakan saja dan tidak produktif," pungkasnya. ■

(dep.mg) foto: Ryan/mr

Komisi V DPR RI Tinjau Rencana Perluasan Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin

Pembangunan infrastruktur di daerah terus di genjot oleh Pemerintah baik secara nasional yang menggunakan APBN maupun pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD. Dalam hal ini, Komisi V DPR RI yang membidangi salah satunya bidang infrastruktur memiliki andil dalam aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah terutamanya yang menggunakan APBN.

Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meninjau pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan terutama rencana perluasan Bandara Syamsudin Noor, optimalisasi serta perluasan Pelabuhan Trisakti Kalsel serta pembangunan jalan bebas hambatan di Kalsel, Senin (27/02).

Dalam pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Udara, Otoritas Bandara Wilayah III, Kepala Bandara Syamsudin Noor, AP I, Air Nav, BMKG dan Basarnas, Lasarus sampaikan bahwa kunjungan Komisi V DPR RI ke Kalsel salah satunya untuk melihat langsung master plan pembangunan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor.

"Kita ingin melihat langsung master plan pembangunan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor, pada dasarnya kita sangat

mendukung adanya upaya peningkatan pelayanan di Bandara ini, salah satunya dengan perluasan Bandara," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, Bandara Syamsudin Noor saat ini sudah menampung pergerakan penumpang mencapai 3,5 juta penumpang per tahun, sementara kapasitas terminal seluas 9.043 m2 hanya mampu menampung hingga 1 juta penumpang per tahun. Sementara panjang runway baru sepanjang 2500 x 45m2 dan apron hanya mampu menampung 12 pesawat.

Selain itu, Bandara Syamsudin Noor saat ini beroperasi 8 maskapai dan rata-rata penerbangan ada 90 penerbangan per hari. Perluasan tahap I Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin direncanakan pada bulan Maret 2017 diantaranya perluasan terminal menjadi 50.359 m2 yang dapat menampung

hingga 6 juta penumpang serta perpanjangan runway hingga 3000 x 45 m2 dan perluasan apron berkapasitas hingga 18 pesawat.

Direncanakan pembangunan dan perluasan Bandara Syamsudin Noor akan dilakukan hingga tahap 4 yaitu pada tahun 2047. Pada tahun tersebut, ditargetkan sudah memiliki terminal penumpang seluas 103.953 m2 yang dapat menampung hingga 12 juta penumpang per tahunnya.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa hasil kunjungan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri terkait. Selain itu, Komisi V DPR RI mengapresiasi, dimana saat ini Bandara Syamsudin Noor tidak lagi menjadi salah satu Bandara yang merugi. ■

(skr) foto : Singgih/mr.



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Bandara Syamsudin Noor, Kalsel

(l/m) foto : Jaka/mr.



IIFG berpose bersama veteran seBandung Raya

IIFPG Kunjungi Legiun Veteran SeBandung Raya

Memperingati hari jadi Fraksi Partai Golkar DPR RI yang ke-49, IIFPG (Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar) DPR RI menggelar bhakti sosial dan silaturahmi dengan para legiun veteran se Bandung Raya.

“Sebagai wujud rasa terimakasih kami kepada para pejuang yang telah membela negara dan mengusir penjajah dari negeri ini, maka hari ini kami IIFPG menggelar silaturahmi sekaligus bhakti sosial kepada para pejuang kita tersebut. Ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulangtahun fraksi partai Golkar yang ke-49,” jelas Lumongga Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (7/3) di Bandung, Jawa Barat.

Raut wajah bahagia dan suka cita terlihat jelas dari para veteran. Betapa tidak, momen tersebut selain sebagai ajang reuni dengan sesama veteran, juga menjadi bukti nyata kepedulian IIFG selaku generasi penerus terhadap para veteran.

Meski demikian para veteran berharap agar kepedulian dari IIFPG itu juga ikut tertular kepada pemerintah, yakni dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap

para veteran. Salah seorang veteran mencontohkan program BPJS yang dikeluarkan Pemerintah.

Hal tersebut sejatinya merupakan program yang sangat baik dan menjadi angin segar bagi para veteran. Sayangnya, mekanisme BPJS yang dianggapnya terlalu berbelit-belit dan bahkan tidak jarang harus ikut mengantri panjang dirasakannya sebagai sesuatu yang sangat menyulitkannya. Betapa tidak, hampir sebagian besar veteran notabene telah berusia lanjut. Sehingga tidak cukup tenaga untuk ikut mengantri berjam-jam lamanya.

Menanggapi hal tersebut, Lumongga mengaku akan menyampaikan masukan tersebut kepada suami-suami dari anggota IIFPG yang notabene merupakan wakil rakyat. Ia berharap masukan tersebut akan ikut mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap para pejuang atau veteran.

Sementara itu Ketua Panitia acara Bhakti sosial, Letti Roem Kono mengaku sangat bahagia acara yang dipersiapkan tidak lebih dari satu minggu itu dapat berjalan lancar dan sukses. Hal itu terlihat dari antusias para veteran mengikuti acara tersebut. Raut wajah bahagia terlihat jelas dari para veteran. Terutama ketika mereka mengikuti berbagai permainan yang telah disusun panitia. Bahkan tidak sedikit dari para veteran yang ikut bernyanyi dan berjoget.

Pada kesempatan itu, tambah Lisa Robert Kardinal, selain memberikan door prize untuk berbagai permainan yang telah disusun panitia, IIFPG juga menyerahkan sejumlah cenderamata, dan uang tanda kasih kepada para veteran. Lebih lanjut baik Lisa, Letti dan Lumongga meyakini bahwa IIFG tidak akan pernah bosan untuk terus berbagi kepada sesama dengan menggelar berbagai acara sejenis di berbagai daerah lainnya. ■

(Ayu), foto : ayu/hr



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau SMA Negeri 1 Sukadana di Lampung Timur, Lampung (kanan) dan PAUD dan TK Bhayangkari di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. (kiri)
(Foto: Sofyan & Tiara)

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, BKD, dipimpin Helmizar melakukan studi lapangan dan analisis pelaksanaan serta penerapan SAP berbasis Akrual di BPK dan BPKP perwakilan Provinsi DIY (10/03)



Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan program E-KTP dan Pilkada serentak di Provinsi NTB dan Bali.
(Foto : Ryan dan Nadya)